

PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

Maria Sophie Muaja, Odi Roni Pinontoan, Oksfriani Jufri Sumampouw

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Univesitas Sam Ratulangi
E-mail add: maria.muaja@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: Sanitasi memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan setiap hari. Salah satu program pemerintah tentang sanitasi yaitu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Namun program ini belum berjalan optimal karena kurangnya peran pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam implementasi STBM Stop Buang Air Besar Sembarangan. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2020 di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang dtentukan secara purposive. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara, perekam suara dan kamera. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis). **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah (kabupaten, kecamatan dan desa) yaitu pelaksana kegiatan orientasi pembuatan media promosi dan kegiatan pelatihan, penganggaran, pelaporan dan pengkoordinasian pelaksanaan program STBM. **Kesimpulan:** Pemerintah telah melakukan berusaha untuk berperan dalam program STBM namun terkendala pada masalah biaya dan koordinasi.

Kata kunci: Peran pemerintah; STBM; Stop BABS; Minahasa

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka menekan masalah sanitasi dan PHBS yaitu melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik. Selain itu, program ini dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Perubahan perilaku dalam STBM dilakukan melalui metode pemicuan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat

sasaran secara kolektif dan mampu membangun sarana sanitasi secara mandiri sesuai kemampuan (Kemenkes RI, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang strategi STBM, program ini terdiri dari lima indikator keluaran (pilar) yaitu stop buang air besar sembarangan (stop BABS) atau *open defecation free* (ODF), cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAMMRT), pengamanan sampah rumah tangga (PSRT), dan pengamanan limbah cair rumah tangga (PLCRT). Terkait dengan hal tersebut, perilaku hidup bersih dan sehat yang dimaksud dalam lima pilar STBM memiliki implikasi yang cukup tinggi dengan kasus diare, menurut riset kesehatan dasar 2010, diare merupakan penyakit berbasis lingkungan yang menjadi penyebab nomor satu kematian bayi di Indonesia, yaitu 42% dari total angka kematian bayi usia 0-11 bulan (Kemenkes RI, 2014).

Penelitian dari Sumampouw *et al* (2016) menunjukkan bahwa angka kasus kejadian diare pada anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan sumur terbuka untuk air minum tercatat 34% lebih berisiko dibandingkan dengan anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan air ledeng. Selain itu, angka diare lebih tinggi sebesar 66% pada anak-anak dari keluarga yang melakukan buang air besar disungai atau diselokan dibandingkan dengan mereka yang memiliki fasilitas jamban pribadi dan septik tank. Sumber pencemaran seperti adanya perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Tinja, sampah atau limbah seperti popok balita yang mengandung sel bakteri kemudian melalui media penularan seperti tangan, air, lalat atau jenis serangga lainnya, tanah, makanan dan minuman bisa masuk kedalam tubuh manusia, hal ini akan menyebabkan infeksi bakteri *E. coli* sehingga timbul penyakit diare. Di Indonesia, sekitar 162 ribu balita meninggal setiap tahun atau sejumlah 460 balita setiap harinya. Dari sudut pandang ekonomi, studi WSP (*Water and Sanitation Programme*) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar \$6,3 miliar (Rp. 56,7 triliun) pertahun akibat buruknya kondisi sanitasi dan *higiene*. Hal ini setara dengan 2,3% dari produk domestik bruto.

Hasil penelitian dari Ahmadi (2019) menunjukkan bahwa faktor pendukung program STBM yaitu dukungan dan komitmen birokrasi pemerintah dan masyarakat. Faktor penghambat program yaitu akses informasi masyarakat terhadap program mekanisme pengawasan, dan keterbatasan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan sanitasi yang melibatkan masyarakat, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut mulai dari pemerintah lokal, agen pelaksana program, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, hingga faktor lingkungan, ekonomi dan sosial-politik. Penelitian ini lebih fokus tentang pelaksanaan pilar pertama STBM pada level pemerintah kecamatan dan kabupaten sebagai pemilik legitimasi di masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam pelaksanaan program STBM pilar 1 di wilayah kerja Puskesmas Langowan Kabupaten Minahasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2020 di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Informan dalam penelitian ini yaitu yaitu petugas penanggung jawab STBM di Puskesmas, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Camat Langowan Timur dan penanggung jawab kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Jadi, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Informan kunci yaitu penanggung jawab STBM di Puskesmas. Variabel penelitian ini yaitu peran pemerintah. Instrumen

penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara, perekam suara dan kamera. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Analisis data dilakukan menurut model Miles dan Huberman yaitu dilakukan sejak responden memberikan jawaban melalui wawancara dan jika jawaban yang diberikan belum memuaskan/ belum mencapai tujuan, maka peneliti memberikan pertanyaan lain sampai data yang diperoleh dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai (data sudah jenuh). Kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penggambaran dan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperoleh bahwa peran pemerintah berbeda-beda baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Peran masing-masing sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kabupaten

Peran pemerintah kabupaten Minahasa yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan orientasi pembuatan media promosi Program STBM.
- b. Melaksanakan kegiatan pelatihan tentang program STBM.
- c. Menyiapkan anggaran untuk program STBM.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program STBM di seluruh Kabupaten Minahasa.

2. Peran Pemerintah Kecamatan

Peran pemerintah kecamatan Langowan Timur yaitu:

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor
- b. Pelaporan

3. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa yaitu:

- a. Koordinasi lintas sektor
- b. Monitoring

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmadi (2019) tentang peran pemerintah pekon dalam pelaksanaan pilar pertama program STBM di Pekon Wonodadi dan Pekon Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dianalisa secara interaktif dan berlangsung terus menerus sehingga menemui kejenuhan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemerintah pekon telah menjalankan peranannya dalam pelaksanaan pilar pertama STBM melalui pembentukan peraturan khusus tentang pelaksanaan pilar pertama di tingkat pekon, melakukan pemicuan dan pendampingan kepada masyarakat, serta penyediaan dana pinjaman pembangunan sarana jamban pribadi masyarakat. Peran dalam aspek pembentukan peraturan khusus untuk terselenggaranya program lebih menonjol dilakukan Pemerintah Pekon Wonodadi, sedangkan Pemerintah Pekon Kediri lebih menunjukkan peranannya dalam kegiatan pemicuan, pendampingan, dan pengawasan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifianty (2017) terkait peran pemerintah lokal dalam program STBM yang menemukan bahwa, peran pemerintah lokal untuk peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat tentang keberhasilan program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro sangat dominan. Pemerintah lokal yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan sanitasi yang melibatkan masyarakat, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut mulai dari pemerintah lokal, agen pelaksana program, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, hingga faktor lingkungan, ekonomi dan sosial-politik.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengarahan dan pemanfaatan daya dan dana yang ada dalam masyarakat. Kegiatan pembangunan di daerah pedesaan membutuhkan peranan dari pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha/swasta, sehingga keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dari pemerintah pusat tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respon masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Pencapaian keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa dan diterima oleh masyarakat (Ahmadi 2019).

Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau yang kemudian disebut STBM, sebagaimana dijelaskan dalam RPJMN tahun 2015- 2019 mengharuskan setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat terendah yaitu desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 program tersebut telah ditetapkan sebagai program nasional dan dalam pengimplementasiannya diserahkan kepada daerah untuk mengatasi permasalahan sanitasi di daerahnya masing-masing.

Jika dilihat dari tujuan program STBM yang berusaha menciptakan kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan lingkungan hidup, keberhasilan program STBM juga pastinya terkait dengan peran pemerintah serta respon masyarakat terkait program tersebut. Maka sebenarnya point utama dari sebuah pembangunan yang berbasis masyarakat atau komunitas adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2015), bahwa implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*) selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial-budayanya.

Masalah dalam pelaksanaan program STBM di kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa yaitu:

- a. Pemerintah kecamatan belum mengetahui tugas dan fungsi
- b. Keterbatasan dana di tingkat desa.
- c. Banyak orang tua yang membuang popok bayi sembarangan.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan program STBM menemukan berbagai kendala yang menghambat dan mendorong keberhasilan implementasi program STBM. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Sudjabat (2012) tentang partisipasi masyarakat desa dalam implementasi program STBM di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa dalam implementasi strategi STBM tidak muncul inisiatif dari masyarakat desa dalam mengatasi masalah perilaku buang air besar sembarangan. Tidak ada usulan dari masyarakat dalam musyawarah untuk memutuskan adanya kegiatan untuk mengatasi masalah buang air besar sembarangan, termasuk memanfaatkan sumber daya yang dikumpulkan secara kolektif dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah ini seperti pada kegiatan-kegiatan yang mereka sudah kerjakan secara partisipatif di desa mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2015) tentang implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang STBM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari segi ukuran dan tujuan program dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana program. Dalam

pelaksanaan program, para pelaksana hanya melakukan langkah pemecuan saja. Sedangkan variabel lainnya seperti sumber daya, variabel karakteristik agen pelaksana dan lainnya telah dilaksanakan, namun pada variabel lingkungan, ekonomi, sosial-politik masih sangat rendah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sutisna dkk (2012) tentang model pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan juga menemukan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang paling utama adalah partisipasi, selain pengetahuan, keterampilan, sumber daya, visi bersama, sensitivitas komunitas, dan komunikasi.

Adanya prinsip peniadaan subsidi dana oleh pemerintah pusat untuk kepemilikan pribadi masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu ketika semua stakeholder pelaksana mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat belum bersinergi maka pembangunan akan terhambat. Sedangkan jika suatu program tidak ada subsidi pembangunan kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat serta dukungan pihak ketiga (LSM/Koperasi/Bumdes/Swasta) sangat dibutuhkan disamping peran pemerintah lokal yang harus mampu mengelola sumber daya tersebut.

Program STBM sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 Pasal (16) Ayat (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat, dan Ayat (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masalah membuang popok bayi sembarangan sangat erat hubungannya dengan masalah budaya. Masyarakat di lokas tempat penelitian menganggap bahwa popok tidak berbahaya pada lingkungan dan kesehatan sehingga dibuang disembarang tempat. Menurut Theresia et al (2015) budaya sesuai dengan norma-norma sosial dan keyakinan individu yang mempertahankan keseimbangan sebagai focal point dalam interaksi sosial berulang. Pandangan yang lebih tajam diungkapkan oleh Akerlof dan Kranton, ia berpendapat bahwa budaya secara langsung mempengaruhi perilaku individu melalui nilai-nilai dan preferensi. Dengan demikian, faktor sosial budaya dan perilaku masyarakat cukup berpengaruh terhadap keberhasilan program kemasyarakatan, selain peran pemerintah.

Dewasa ini, banyak ibu memilih popok atau *diapers* sebagai alternatif untuk mengontrol BAK dan BAB anak. Pergeseran ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi, motivasi orang tua, serta lingkungan sosial. Berdasarkan hasil survey Sigma Research pada tahun 2017, *diapers* menduduki persentase dengan tingkat konsumsi tertinggi produk balita sebesar 97,1%. Potensi pasar industri *diapers* mencapai Rp 14 triliun pada tahun 2017 (Sigma Research, 2017). Hal ini membuktikan bahwa *diapers* lebih banyak dipertimbangkan dalam memenuhi kebutuhan buang air anak. Menjamurnya *diapers* disertai dengan fasilitas yang memudahkan ibu untuk menjangkau produk tersebut.

Diapers memberikan pertimbangan praktis dan efisiensi tenaga dan waktu, sehingga ibu tidak perlu repot mengontrol BAK dan BAB anak sewaktu-waktu. Anak yang dipakaikan *diapers* diasumsikan mengalami keterlambatan *toilet training*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nining (2013) mengenai peparuh pola asuh orang tua dan intensitas penggunaan *diapers* terhadap tingkat kesiapan *toilet training* anak usia balita, dapat diketahui bahwa anak yang intens memakai *diapers* akan mengalami ketergantungan terhadap *diapers* sehingga kesiapan *toilet training*nya berkurang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan kesiapan tersebut adalah dengan meminimalisir penggunaan *diapers* pada anak.

Kebiasaan menggunakan *diapers* tanpa disadari memunculkan konsekuensi dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, psikis, ekonomi, dan lingkungan fisik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran ibu akan pentingnya penggunaan *diapers* secara bijak. Salah satu contoh fenomena membuktikan dampak yang ditimbulkan ialah pencemaran akibat pembuangan emisi *diapers* sembarangan. Seperti yang dikutip dari Zahro (2017), bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ecoton, Sungai Surabaya telah tercemar akut popok bayi sekali pakai sebesar 37%. Bahan-bahan kimia yang sukar diuraikan serta sisa metabolisme anak yang menempel dan belum sempat dibersihkan meningkatkan bakteri *E. coli* sehingga berpengaruh buruk terhadap sumber bahan baku air minum (PDAM) yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan bakteri ini di lingkungan merupakan salah satu indikator terjadinya pencemaran tinja pada lingkungan (Sumampouw dan Risjani, 2014). Tingginya bakteri ini dapat menyebabkan penyakit diare khususnya pada anak balita (Pinontoan dan Sumampouw, 2019; Sumampouw, 2019).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka kesimpulannya yaitu peran pemerintah (kabupaten, kecamatan dan desa) yaitu pelaksana kegiatan orientasi pembuatan media promosi dan kegiatan pelatihan, penganggaran, pelaporan dan pengkoordinasian pelaksanaan program STBM. Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu adanya kerjasama lintas sektoral yang lebih baik mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan STBM bisa berjalan dengan maksimal. Masalah ketersediaan dana di tingkat desa perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dengan melakukan melibatkan pihak pengusaha/wirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2019). Analisis Peran Pemerintah Pekon Dalam Pelaksanaan Pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kabupaten Pringsewu (Studi di Pekon Wonodadi dan Pekon Kediri Kecamatan Gadingrejo). Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNIVERSITAS Lampung
- Arifianty, D. P. (2017). Peran Pemerintah Lokal Dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat: Studi Tentang Keberhasilan Program Open Defecation Free (ODF) Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 5 No. 3.
- Kemenkes, R. I. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. *Jakarta: Kementrian Kesehatan RI*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat [internet]. [diunduh 26 September 2016]. Tersedia pada: <http://www.depkes.go.id/article/print/16060100003/menuju-100-akses-sanitasi-indonesia-2019.html>
- Mardikanto dan Poerwoko. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Nining, S. F. (2013). Hubungan pengetahuan dan perilaku ibu dalam menerapkan toilet training dengan kebiasaan mengompol pada anak usia prasekolah di RW 02 Kelurahan Babakan Kota Tangerang. Tesis. UIN Jakarta
- Pinontoan, O. R., & Sumampouw, O. J. (2019). *Dasar Kesehatan Lingkungan*. Deepublish

- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2016. STBM. [internet].[diunduh 26 September 2016]. Tersedia pada: <http://stbm-indonesia.org/?page=tentang-stbm&command=stbm&id1=2>
- Sigma Research. (2017). Studi Pasar dan Perilaku Penggunaan *Diapers* di Indonesia. Retrieved from <http://sigmaresearch.co.id/moms-baby-trend-and-behavior-diaper/>
- Sudjabat, E. 2012. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Implementasi Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Grobogan. (Tesis). Depok. Universitas Indonesia
- Sumampouw, O. J. (2017). *Diare Balita: Suatu Tinjauan dari bidang Kesehatan Masyarakat*. Deepublish.
- Sumampouw, O. J. (2019). *Mikrobiologi Kesehatan*. Deepublish.
- Sumampouw, O. J., & Risjani, Y. (2014). Bacteria as indicators of environmental pollution. *environment*, 51, 52.
- Sumampouw, O. J., Nelwan, J. E., & Rumayar, A. A. (2019). Socioeconomic factors associated with diarrhea among under-five children in Manado Coastal Area, Indonesia. *Journal of global infectious diseases*, 11(4), 140.
- Sutisna, E., Ravik, S., Bhisma, K., Drajat, M., Kartono, T., & Rifai, W. (2012). Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Studi Program Desa Siaga Community Empowerment Model in Health Sector, Study on Village Preparadness Program. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(4), 186-192.
- Wahyuningsih, M. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Studi Pada Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Publika*, 4(3).
- Wulandari PR. 2013. Analisis partisipasi masyarakat dan kepemimpinan terhadap tingkat keberhasilan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng [tesis]. Bali(ID): Universitas Udayana Denpasar. [internet]. [diunduh 24 Oktober 2016]. Dapat diunduh dari: http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-939-1166002174-tesis%20risika%20fix.pdf
- Yuriati, P., & Rani, N. K. (2018). Hubungan Sikap Ibu dengan Kejadian Diare pada Balita di Puskesmas Kota Tanjungpinang tahun 2018. *Cakrawala Kesehatan: Kumpulan Jurnal Kesehatan*, 9(2).
- Zahro, F. (2017). Sungai Surabaya Tercemar Akut Popok Bayi, Akibatnya Sungguh Mengerikan. *TribunJatim.com*. Surabaya. Retrieved from <http://jatim.tribunnews.com/2017/07/10/sungai-surabaya-tercemar-akut-popokbayi-akibatnya-sungguh-mengerikan>.